

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress*

Finky Septira¹ Ida Farida Adi Prawira²

Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia¹

Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia²

Abstract

This study aims to find out how the influence of regional own revenue growth, growth in capital expenditure, and economic growth that is proxied by GDRP influences fiscal stress in Sumatera-based districts and cities in 2014-2016. The population of this study is the district/city government in Sumatera Island which consist of 154 district/cities. The sample selection was determined based on purposive sampling criteria so that 106 district/cities governments were sampled in this study. This study uses secondary data in the form Realization of Regional Revenue and Expenditure (LRA APBD) as well as data in the form of data on Domestic Regional Products and Gross (GDRP). Hypotesis testing tools in this study using E-views 9. From the results of the test, researcher found that the growth of regional own revenue and economic growth that is proxied by GDRP affect fiscal stress while the growth of capital expenditure does not affect fiscal stress.

Keywords. Capital Expenditure; Economic Growth; Fiscal Stress; PDRB; Regional Own Revenue.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB berpengaruh terhadap fiscal stress pada kabupaten dan kota se-Sumatera tahun 2014-2016. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang terdiri dari 154 kabupaten/kota. Pemilihan sampel ditentukan berdasarkan kriteria purposive sampling sehingga didapatkan 106 pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) serta data berupa data Produk Regional Domestik dan Bruto (PDRB). Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software Eviews 9. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB berpengaruh terhadap fiscal stress sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap fiscal stress.

Kata Kunci. Belanja Modal; Fiscal Stress; Pendapatan Asli Daerah; PDRD; Pertumbuhan Ekonomi.

Corresponding author. Email. finkys96@gmail.com, ida.farida@upi.edu

How to cite this article. Septira, F., Farida, I., & Prawira, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 57–64. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/15949>

History of article. Received: Agustus 2018, Revision: Oktober 2018, Published: Januari 2019

PENDAHULUAN

Studi mengenai *fiscal stress* ditingkat daerah menjadi semakin penting terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya, penyediaan barang dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin

meningkat setiap tahun (Firstanto, 2015). Menurut Arnett (2012), *fiscal stress* seringkali dikaitkan dengan kondisi keuangan yang buruk, krisis keuangan dan atau kesulitan keuangan, defisit/tekanan anggaran. *Fiscal stress* terjadi ketika penerimaan negara tidak mampu memenuhi belanja atau pengeluaran negara, baik tingkat pusat maupun lokal.

Sejak Pemerintah menerapkan otonomi daerah pada tahun 2001 terjadi perubahan

paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi. Undang – Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lah yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, pada hakekatnya otonomi daerah memberikan peluang yang sangat besar kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya yang lainnya yang merupakan salah satu milik kekayaan daerah. Akan tetapi setiap daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda, daerah yang tidak memiliki potensi yang memadai, kebijakan tersebut sangatlah memberatkan karena tidak memiliki sumber daya yang melimpah dan akan kesulitan membiayai belanja daerah sehingga akan memicu kesulitan keuangan, tekanan anggaran/ *fiscal stress* (Muryawan & Sukarsa, 2016).

Pada era otonomi *fiscal stress* dinilai lebih kuat dibandingkan sebelum otonomi, karena daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki maupun kapasitas fiskal yang menandakan tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah karena sumber penerimaan itu baik provinsi, kabupaten dan kotan didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat (Kuncoro, 2004).

Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajaknya guna meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsud dan Akoto, 2004). Maka dari itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Upaya pajak (*Tax Effort*) merupakan upaya peningkatan pajak daerah

yang diukur dengan perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Budi dan Priyo, 2008).

Tidak hanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang dapat mengindikasikan adanya *fiscal stress* tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pola/struktur belanja daerah. (Adi, 2007) berargumen bahwa perubahan pola belanja, terutama dengan peningkatan belanja pembangunan menjadi hal yang logis dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan begitu, diharapkan pemerintah daerah semakin mendekati diri dalam berbagai macam kegiatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Anggaran belanja daerah selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi di daerah tersebut. Oleh karenanya setiap daerah yang melaksanakan otonomi dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali setiap potensi penerimaan baru agar ketersediaan dana untuk membiayai belanja daerah tetap tersedia. Jika tidak adanya penerimaan daerah yang memadai untuk membiayai belanja daerah, maka hal ini akan mempengaruhi terjadinya *fiscal stress*, mengingat perubahan pembiayaan akan lebih banyak dimana disebabkan dengan adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung dalam hal ini belanja pembangunan (Muda, 2012). Peningkatan belanja modal untuk pembangunan secara langsung akan meningkatkan anggaran belanja daerah. Belanja modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga ditujukan untuk berbagai jasa yang terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Dengan begitu *fiscal stress*

dapat terjadi karena dipicu oleh defisit anggaran dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan (Reschovsky, 2003)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menggambarkan kondisi kemakmuran masyarakatnya, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan bagaimana “kue pembangunan” diperbesar, tapi belum menggambarkan bagaimana “kue pembangunan” tersebut didistribusikan secara merata dalam rangka kesejahteraan masyarakat. (Firstanto, 2015).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Muda, 2012). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dari populasi penelitian yaitu kabupaten/kota se-Sumatera, alat ukur yang digunakan untuk mengukur *fiscal stress* dan teori yang dipakai. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Realisasi Anggaran – APBD dan data statistik daerah yaitu jumlah Produk domestik regional bruto (PDRB). Periode APBD yang menjadi pengamatan penelitian adalah tahun 2014 sampai dengan 2016.

KAJIAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara komponen sumber PAD yang paling banyak menyumbang adalah pajak daerah dan retribusi daerah sehingga PAD identik dengan pajak dan retribusi daerah.

Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2012, hlm. 107) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Erlina, dkk. (2015, hlm. 121) mengatakan bahwa komponen belanja modal terdiri dari 5 (lima) macam yaitu: 1) Belanja modal tanah; 2) Belanja modal gedung dan bangunan; 3) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; 4) Belanja fisik lainnya; dan 5) Belanja modal peralatan dan mesin.

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Pulungan, Daulay, & Siregar, 2017).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam satu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. (Rahman & Chamelia, 2015, hlm. 92).

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut (Soemitro, 2017) dibagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu :

1. PDRB atas Dasar Harga Konstan: menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung memakai harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.
2. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Riil): menggambarkan nilai tambahan barang

dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya.

Fiscal Stress

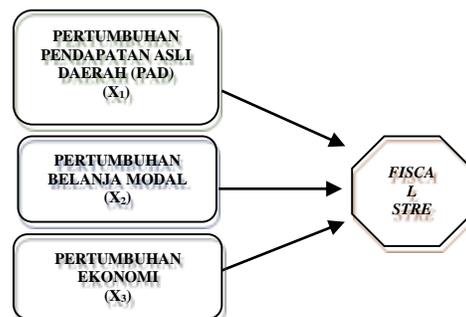
Berdasarkan literatur yang ada, menunjukkan bahwa *fiscal stress* adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia (Muller & Rohr-Zanker, 1998; Premchand, 1993; Gold, 1992; Skidmore & Scorsone, 2009; Congressional Budget Office, 2010; Copeland & Ingram, 1983) atau lebih jelasnya yaitu pengeluaran yang melebihi sumber daya keuangan (Gold, 1992) dalam Rakabe (2013). Sedangkan menurut (Arnett & Arnett, 2012) *fiscal stress* didefinisikan sebagai kondisi dimana pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pemerintah juga tidak mampu meningkatkan penerimaan daerahnya atau menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Literatur terkait kondisi keuangan dan pengukuran *fiscal stress* menekankan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran *fiscal stress* dalam spektrum kondisi keuangan publik. Terdapat 5 (lima) kategori besar pengukuran *fiscal stress* di tingkat daerah yang dikaji oleh (Arnett & Arnett, 2012), antara lain ; defisit anggaran (*budget deficit*), saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unserved budget balance*), penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (*decline in state's revenues performance*), peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*) dan rasio keuangan (*financial ratios*). Hasil kajian (Arnett & Arnett, 2012) menekankan bahwa *fund balance* (Saldo dana = selisih penerimaan dan pengeluaran) itu penting dalam menentukan indikator (ukuran) *fiscal stress*

karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah agar tetap bertahan beroperasi meski dalam kondisi ekonomi yang mengalami permasalahan keuangan sekalipun. Pemerintah yang memiliki saldo dana (*fund balance*) masih mampu bertahan beroperasi untuk menyerap dampak negatif dari permasalahan keuangan tersebut. Dalam spektrum kondisi keuangan publik, *fiscal stress* dapat dikategorikan sebagai kondisi keuangan publik yang lemah (*weak financial condition*).

KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap *fiscal stress*; 2) Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh terhadap *fiscal stress*; 3) Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Untuk menjawab masalah dan mengungkap tujuan penelitian maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* www.djpk.go.id berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) serta data dari *website* www.bps.go.id yang datanya berupa data Produk Regional Domestik dan Bruto (PDRB). Alat ukur variabel *fiscal stress* yang digunakan merujuk pada Arnett (2012). Metode pengambilan sampel dengan *purposive sampling* sehingga jumlah sampel yang didapat sebanyak 106 kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan menggunakan alat bantu *software Eviews 9* dalam menganalisis uji hipotesisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, pertumbuhan asli daerah pada sampel penelitian ini dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut menunjukkan nilai yang berfluktuasi dimana dimana pada tahun 2014 rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten dan kota Sumatera menunjukkan nilai 47,95% dimana Kabupaten Aceh Barat yang memperoleh nilai pertumbuhan PAD tertinggi sedangkan Nias Selatan terendah, lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 35,45% menjadi 12,5%, hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD pada tahun 2015 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,77% menjadi 14,27% yang artinya rata-rata pemerintah mampu merealisasikan nilai PAD yang lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Demikian pula berdasarkan hasil analisis deskriptif, pertumbuhan belanja modal dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2016 mengalami tren yang berfluktuatif, dengan laju pertumbuhan belanja modal tertinggi yang diperoleh oleh Kota Tanjung Pinang yakni 189,54% pada tahun 2016 dan laju pertumbuhan belanja modal terendah dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2016 diperoleh oleh Kabupaten Tanjung Pinang juga dengan nilai sebesar -87,10% pada tahun 2015. hal itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan belanja modal setiap tahunnya untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti yang terjadi pada tahun 2014-2015 yang mengalami penurunan namun pada tahun 2015-2016 menunjukkan kenaikan nilai rata-rata pertumbuhan belanja modal.

Adapun hasil deskriptif pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh PDRB yang memperlihatkan hasil yang berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2016, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Kerinci yakni 9,93% pada tahun 2014 dan laju pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2016 diperoleh oleh Kabupaten Bengkalis dengan nilai penurunan sebesar 0,08% menjadi -3,85%. Adanya penurunan tersebut tak lain karena menurunnya harga minyak dunia seperti yang dikutip dari riaugreen.com (2018), Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, H Jondi Indra Bustian, menyebutkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis yang negatif tidak lain karena menurunnya harga minyak dunia dan belum adanya kepastian perpanjangan kontrak PT Chevron.

Selanjutnya hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah pengaruh pertumbuhan PAD (X1), pertumbuhan belanja modal (X2) dan pertumbuhan ekonomi (X3) terhadap *fiscal stress* (Y). Berdasarkan hasil uji chow yang ditunjukkan

pada Tabel 1.1, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*. Berikut merupakan hasil regresi data panel dengan *fixed effect*:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Regresi Data Panel (Variabel Dependen = *Fiscal Stress*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PPAD	6.84E+08	67091063	10.19949	0.0000
PBM	4.40E+08	2.39E+08	1.838441	0.0674
PPDRB	-4.00E+10	1.27E+10	-3.140772	0.0019
C	-1.01E+12	5.87E+10	-17.13797	0.0000

Pengaruh Pertumbuhan Asli Daerah Terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi data panel menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan PAD memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0.05 (5%) yaitu sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien sebesar 6.84E+08. Yang artinya bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besaran pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi *fiscal stress* (tekanan keuangan) yang dialami pemerintah daerah tersebut. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi dalam pengelolaan PAD.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2012), Maher dan Deller (2007) dan Gunara (2017) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firstanto (2017) yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan hasil uji analisis dengan menggunakan regresi data panel

menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai probabilitas yang dimana lebih dari 5% ($\alpha=0.05$), yaitu sebesar 0.0674 dan nilai koefisien sebesar 4.40E+08 $\neq 0$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Nilai koefisien bermakna bahwa setiap ada peningkatan belanja modal sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan *fiscal stress* sebesar 4.40E+08. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan belanja modal maka akan semakin tinggi pula *fiscal stress*nya. Besar kecilnya belanja modal berpengaruh pada besar kecilnya *fiscal stress* yang terjadi hal itu tergantung pada besarnya penerimaan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah serta pemanfaatannya (Martini, 2015)

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Muda (2012) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firstanto (2015) dan juga Shamsud dan Akoto (2004) yang menyatakan bahwa pertumbuhan belanja modal memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas kurang dari 0.05 (5%) yaitu sebesar 0.0019 dan nilai koefisien sebesar -4.00E+10 $\neq 0$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Nilai koefisien menunjukkan bahwa jika ada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu satuan, maka akan menambah *fiscal stress* sebesar -4.00E+10. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah kabupaten/kota pada sampel penelitian ini maka akan menurunkan

angka *fiscal stress*. Karena pada dasarnya untuk mengurangi kondisi *fiscal stress* pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Shamsub & Akoto, 2004).

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif (2015) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2012), Firsianto (2017), dan Gunara (2017) yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Simpulan

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress* (studi kasus pada kabupaten/kota se-Sumatera 2014-2016) dengan sampel sebanyak 106, maka simpulan yaitu Pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah suatu daerah maka diprediksikan akan mengurangi tingkat *fiscal stress*.

Pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hal tersebut karena setiap daerah memiliki program yang berbeda-beda untuk membangun daerahnya, besar kecilnya belanja modal berpengaruh terhadap besar kecilnya *fiscal stress* yang terjadi tergantung pada besarnya penerimaan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah serta pemanfaatannya. Jika dilihat dari peningkatan dan penurunan belanja modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera menunjukkan bahwa pemerintah ingin berupaya meningkatkan PAD nya melalui pemanfaatan belanja modal. Dengan pemanfaatan belanja modal yang efektif dan efisien akan

memaksimalkan penerimaan daerah serta berdampak akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah kabupaten/kota pada sampel penelitian ini maka akan menurunkan angka *fiscal stress*. Karena pada dasarnya untuk mengurangi kondisi *fiscal stress* pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Shamsub & Akoto, 2004).

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, adapun saran yaitu bahwa semakin kecil PAD maka semakin besar *fiscal stress* yang dialami daerah tersebut. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya dari tahun ke tahun dengan menggali potensi sumber kekayaan yang dimiliki daerah sehingga dapat memenuhi pengeluarannya dan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *fiscal stress*. Karena kemampuan variabel bebas (pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi) dalam menjelaskan variabel terikat (*fiscal stress*) pada penelitian ini hanya sebesar 64,30% sedangkan 35,70% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Daftar Pustaka

Adi, P. H. (2007). Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi. The 1st National Accounting Conference, (Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta).

- Arnett, S. B. (2012). Fiscal stress in the US states: An analysis of measures and responses.
- Firstanto, R. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pad, Pdrb, dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunara, E. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Di Provinsi Kalimantan Tengah. Univerisity of Gajah Mada.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Indonesia (2004). Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintah Daerah.
- Indonesia (2004). Undang-Undang No.33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan dan Strategi. Jakarta: Erlangga.
- Maher, C. S., & Deller, S. C. (2007). Municipal Responses to Fiscal Stress. *International Journal of Public Administration*, 30, 1549–1572.
- Muda, I. (2012). Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.13140/2.1.3934.2880>
- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 229–252. Retrieved from <http://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/9379>
- Pulungan, F. S., Daulay, M., & Siregar, H. S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomidengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderatingpada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah"INTEGRITAS"*, 3(2).
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor - faktor yang mempengaruhi pdrb kabupaten / kota jawa tengah tahun 2008-2012, 8(1), 88–99. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>
- Rakabe, E. (2013). The State of Fiscal Stress in South Africa ' s Provinces : Improving fiscal performance List of Figures.
- Reschovsky, A. (2003). The Implication of State Fiscal Stress for Local Governments, 53706(April).
- Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 16(1), 40–61.
- Skidmore, M., & Scorsone, E. (2011). Causes and consequences of fiscal stress in Michigan cities. *Regional Science and Urban Economics* (Vol. 41). <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.02.007>
- Soemitro, S. (2017). *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press.